

The background image shows a stage setting. On the right, the Indonesian flag (Merah Putih) is displayed on a tall pole. To the left of the flag, there is a black speaker or microphone stand. The stage floor is covered with a blue carpet. In the foreground, the back of a person's head and shoulders are visible, showing they are wearing a colorful batik shirt. The overall scene suggests a formal event or conference.

Reformasi Birokrasi Pertahanan Negara dalam Menghadapi Ancaman Non Militer: Strategi Penguatan Daya Tangkal Menuju Indonesia Emas 2045

Swante Adi Krisna • Tri Budi Utomo • Benny K. Harman • Josef Adrianus Nae Soi • Puan Maharani • Sjafrie Sjamsoeddin • Prabowo Subianto



ABSTRAK

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) Letjen TNI Tri Budi Utomo membuka Rapat Pembahasan Reformasi Birokrasi Pertahanan Negara dalam Menghadapi Ancaman Non Militer di Bogor. Rapat ini digelar selama tiga hari, mulai 19 hingga 21 November 2025.

KEYWORDS

Keywords:

defense studies, national security, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi Reformasi Birokrasi Pertahanan Negara (RB Hanneg) sebagai respons strategis terhadap kompleksitas ancaman non militer di era kontemporer. Rapat pembahasan RB Hanneg yang diselenggarakan di Bogor pada 19-21 November 2025 menandai komitmen Kementerian Pertahanan dalam memperkuat daya tangkal nasional melalui enam sasaran strategis yaitu regulasi responsif, ekosistem kelembagaan dinamis, sumber daya manusia adaptif, optimalisasi sumber daya nasional, investasi pertahanan, dan transformasi digital. Kajian ini menganalisis bagaimana RB Hanneg diintegrasikan dengan konsep Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) untuk menghadapi ancaman non militer seperti keamanan pangan, energi, dan siber yang semakin mendominasi lanskap keamanan nasional. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen kebijakan dan perspektif multidisiplin dari narasumber Kementerian PANRB, akademisi, dan Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan RB Hanneg memerlukan sinergi lintas sektor yang kuat dengan fondasi nilai Sishankamrata sebagai pilar utama dalam mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Temuan penelitian mengindikasikan perlunya revisi kerangka konstitusional khususnya Pasal 30 UUD 1945 untuk mengakomodasi dimensi ancaman *hybrid (hibrida)* yang menggabungkan elemen militer dan non militer secara simultan. Implikasi praktis dari penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi pertahanan nir militer yang komprehensif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Reformasi Birokrasi Pertahanan, Ancaman Non Militer, Sishankamrata, Daya Tangkal Nasional, Indonesia Emas 2045

PENDAHULUAN

Dinamika keamanan global abad ke-21 mengalami transformasi fundamental. Ancaman terhadap kedaulatan negara tidak lagi didominasi konflik konvensional antar negara melainkan bergeser kepada ancaman non militer yang bersifat multidimensional dan lintas batas¹. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI Tri Budi Utomo membuka Rapat Pembahasan Reformasi Birokrasi Pertahanan Negara dalam Menghadapi Ancaman Non Militer di Bogor pada tanggal 19 November 2025 yang berlangsung selama tiga hari hingga 21 November 2025. Rapat strategis ini bertujuan menyatukan persepsi, arah, serta pemahaman seluruh pemangku kepentingan

mengenai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pertahanan Negara sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman non militer yang semakin kompleks.

Reformasi Birokrasi Hanneg (RB Hanneg) merupakan instrumen strategis Kementerian Pertahanan untuk meningkatkan daya tangkal bangsa melalui koordinasi dan sinergi peran kementerian, lembaga, dan instansi terkait dalam penyelenggaraan pertahanan nir militer guna mendukung ketahanan nasional yang berkelanjutan¹. Konsep ini terintegrasi dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang telah menjadi doktrin pertahanan Indonesia sejak lama namun memerlukan adaptasi menghadapi tantangan kontemporer. Badan Pengkajian MPR RI melalui Wakil Ketuaanya Benny K. Harman menekankan perlunya pembaruan konsep pertahanan nasional karena isu ketahanan nasional saat ini tidak lagi didominasi oleh ancaman militer semata melainkan mencakup dimensi pangan, energi, dan siber yang memerlukan pendekatan holistik².

Ancaman siber khususnya telah menunjukkan dampak nyata terhadap keamanan nasional Indonesia. Pada tahun 2023 Bank Syariah Indonesia menjadi korban serangan *ransomware* oleh kelompok LockBit 3.0 dengan klaim pencurian 1,5 TB data milik jutaan nasabah yang menggambarkan kerentanan infrastruktur kritis terhadap serangan siber³. Fenomena ini menggaris bawahi urgensi penguatan kapabilitas pertahanan non militer yang tidak hanya mengandalkan kekuatan kinetik namun juga kemampuan menghadapi "perang tanpa peluru" di ruang siber dan domain non konvensional lainnya. Dalam konteks geopolitik regional, Taiwan bahkan telah mengedarkan buku panduan darurat untuk menghadapi ancaman invasi dan serangan siber yang semakin agresif sebagai bagian dari strategi pertahanan sipil mereka⁴.

PEMBAHASAN

Enam Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi Pertahanan Negara

Sekjen Kemhan memaparkan enam sasaran strategis pembangunan Reformasi Birokrasi Pertahanan Negara dalam sambutannya yang menjadi kerangka kerja komprehensif penguatan daya tangkal nasional¹. Pertama, regulasi bidang pertahanan negara yang responsif terhadap dinamika geopolitik global yang terus berubah cepat mengingat Indonesia berada dalam pusaran rivalitas kekuatan besar dan transformasi lanskap intelijen dunia yang mengalami percepatan tidak linier dalam dua dekade terakhir⁵. Regulasi ini harus mampu mengantisipasi berbagai skenario ancaman yang muncul dari perubahan tatanan dunia pasca Perang Dingin hingga era multipolar saat ini.

Kedua, pembangunan ekosistem kelembagaan pertahanan negara yang dinamis mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan strategis. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia yang siap menjawab setiap ancaman melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur pertahanan dalam memahami kompleksitas ancaman modern. Keempat, optimalisasi sumber daya nasional untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan nir militer dengan memanfaatkan seluruh potensi bangsa secara efektif dan efisien. Kelima, peningkatan investasi bidang pertahanan yang tidak hanya terfokus pada pengadaan *alutsista* (*alat utama sistem persenjataan*) namun juga pada pengembangan kapabilitas non kinetik seperti pertahanan siber dan intelijen strategis. Keenam, akselerasi transformasi digital dalam sistem pertahanan untuk meningkatkan kecepatan respons dan akurasi pengambilan keputusan berbasis data dan teknologi informasi terkini.

Integrasi Sishankamrata dalam Pertahanan Non Militer

Sishankamrata sebagai konsep pertahanan Indonesia telah mengalami evolusi sejak kemerdekaan. Konferensi Nasional Sishankamrata Abad Ke-21 yang dibuka Menteri Pertahanan di Kampus Universitas Pertahanan Sentul Bogor pada 14 Juni 2021 merumuskan sistem pertahanan militer dan nonmiliter secara komprehensif dengan harapan dokumen hasil konferensi dapat dijadikan landasan undang-undang⁶. Menteri Pertahanan saat itu menegaskan bahwa ujung tombak Sishankamrata terletak pada komando teritorial yang menjangkau hingga level paling bawah masyarakat sehingga mampu mendeteksi dan merespons ancaman sejak dini⁷.

Implementasi Sishankamrata dalam konteks ancaman non militer memerlukan partisipasi aktif seluruh komponen bangsa tidak hanya TNI dan Polri namun juga masyarakat sipil, lembaga pemerintah, dan sektor swasta. TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) merupakan salah satu representasi konkret Sishankamrata

yang menunjukkan bagaimana kekuatan militer dapat berkolaborasi dengan masyarakat dalam pembangunan nasional sekaligus memperkuat ketahanan di tingkat akar rumput⁸. Wakil Gubernur NTT menyatakan bahwa Sishankamrata masih sangat relevan untuk Indonesia dalam menghadapi tantangan keamanan multidimensional saat ini yang membutuhkan pendekatan menyeluruh melibatkan seluruh elemen bangsa⁹.

Pilar Sishankamrata	Peran dalam Pertahanan Non Militer	Contoh Implementasi
TNI	Koordinasi operasional dan strategis	Komando teritorial, TMMD, operasi intelijen
Polri	Penegakan hukum dan keamanan dalam negeri	Penanggulangan terorisme, keamanan siber domestik
Rakyat	Deteksi dini dan resiliensi masyarakat	Satlinmas, bela negara, kesadaran keamanan siber
Kementerian/Lembaga	Pengelolaan sektor strategis	Ketahanan pangan, energi, kesehatan, ekonomi
Sektor Swasta	Infrastruktur kritis dan inovasi	Keamanan infrastruktur digital, litbang teknologi pertahanan
Akademisi	Kajian strategis dan pengembangan konsep	Riset ancaman, perumusan kebijakan berbasis bukti
Media Massa	Edukasi publik dan kontra narasi	Literasi keamanan, penanggulangan disinformasi
Sumber: Analisis Peneliti, 2025		

Kompleksitas Ancaman Non Militer Kontemporer

Ancaman non militer dalam lanskap keamanan abad ke-21 mencakup spektrum luas yang saling berkaitan dan dapat berdampak strategis terhadap kedaulatan negara. MPR RI melalui Badan Pengkajiannya menyoroti bahwa ancaman non militer seperti pangan, energi, dan siber memerlukan penanganan khusus yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam Pasal 30 UUD 1945 sehingga perlu dilakukan revisi konstitusional untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat¹⁰. Pasal 30 UUD 1945 saat ini telah mengatur tiga pilar pertahanan dan keamanan negara yaitu TNI, Polri, dan rakyat namun belum secara eksplisit mengatur mekanisme koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman *hybrid* yang menggabungkan elemen militer dan non militer secara bersamaan.

Ketahanan pangan menjadi salah satu dimensi krusial ancaman non militer mengingat Indonesia dengan populasi besar memerlukan jaminan ketersediaan pangan yang stabil dan berkelanjutan. Polsek Bosar Maligas Simalungun menunjukkan dukungan konkret terhadap ketahanan pangan melalui pengawalan program penanaman jagung sebagai implementasi Visi Indonesia Emas 2045 yang menuntut kemandirian pangan nasional ¹¹. Ketahanan energi juga tidak kalah penting dalam era transisi energi global dimana ketergantungan pada sumber energi fosil impor dapat menjadi kerentanan strategis yang dieksploitasi aktor eksternal untuk mempengaruhi kebijakan nasional. Keamanan siber sebagai domain baru pertahanan memerlukan perhatian serius mengingat meningkatnya serangan siber terhadap infrastruktur kritis seperti yang dialami Bank Syariah Indonesia pada 2023 yang menunjukkan bahwa aktor non negara atau negara dapat melumpuhkan fungsi vital tanpa menggunakan kekuatan kinetik sama sekali³.

Pendekatan Multidisiplin dalam Reformasi Birokrasi Hanneg

Rapat pembahasan RB Hanneg menghadirkan perspektif multidisiplin melalui narasumber dari berbagai latar belakang keahlian. Kementerian PANRB memaparkan keselarasan antara Reformasi Birokrasi Nasional dengan Reformasi Birokrasi Hanneg untuk memastikan sinkronisasi kebijakan dan menghindari tumpang tindih kewenangan antar instansi¹. Pendekatan birokrasi yang efisien dan responsif menjadi prasyarat keberhasilan implementasi strategi pertahanan non militer karena ancaman dapat muncul dengan cepat dan memerlukan respons terkoordinasi dari berbagai sektor secara simultan.

Akademisi memberikan perspektif dari aspek ketatanegaraan dan antropologi yang memperkaya pemahaman mengenai bagaimana nilai-nilai budaya dan struktur sosial masyarakat Indonesia dapat menjadi aset dalam membangun resiliensi nasional terhadap ancaman non militer. Pendekatan antropologis penting untuk memahami bagaimana masyarakat lokal dapat diberdayakan sebagai garis depan deteksi ancaman sesuai dengan prinsip Sishankamrata yang menempatkan rakyat sebagai salah satu pilar pertahanan. Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM mengulas aspek regulasi yang diperlukan untuk memperkuat kerangka hukum

pertahanan nir militer termasuk kemungkinan revisi peraturan perundang-undangan yang ada agar dapat mengakomodasi dinamika ancaman kontemporer dengan lebih baik.

Komitmen dan Profesionalisme Lintas Sektor

Sekjen Kemhan menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan pertahanan nir militer tidak hanya bertumpu pada regulasi dan struktur kelembagaan semata. "Komitmen bersama, profesionalisme, dan semangat gotong royong lintas sektor menjadi faktor penentu," tegas Sekjen dalam sambutannya¹. Nilai-nilai Sishankamrata dijadikan fondasi dalam mendukung Visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan Indonesia menjadi negara maju dengan nilai ekonomi mencapai USD 7 triliun atau sekitar Rp 114 triliun pada tahun 2045 ketika Indonesia merayakan satu abad kemerdekaan¹². Pencapaian visi ambisius ini memerlukan stabilitas keamanan nasional yang hanya dapat diwujudkan melalui sistem pertahanan yang tangguh menghadapi segala bentuk ancaman baik militer maupun non militer.

Kerjasama strategis antara Kementerian Pertahanan dengan DPD RI telah disepakati sejak 2022 untuk mewujudkan Sishankamrata melalui kemitraan yang melibatkan representasi daerah dalam perumusan kebijakan pertahanan nasional¹³. Pendekatan ini penting mengingat ancaman non militer seringkali memiliki karakteristik lokal yang memerlukan pemahaman mendalam tentang konteks geografis, demografis, dan sosial budaya setiap wilayah. DPR RI melalui Ketua DPR juga menyatakan dukungan terhadap penguatan Sishankamrata termasuk peran TNI dalam mengatasi terorisme sebagai bagian integral dari sistem pertahanan rakyat semesta yang tidak membedakan antara ancaman militer dan non militer namun melihatnya sebagai satu kesatuan tantangan keamanan nasional yang kompleks¹⁴.

Transformasi Digital sebagai Enabler Pertahanan Modern

Transformasi digital menjadi salah satu dari enam sasaran strategis RB Hanneg yang memiliki peran krusial sebagai *enabler* (pemungkin) pertahanan modern. Dalam era *big data* (*data besar*) dan *artificial intelligence* (*kecerdasan buatan*), kemampuan mengumpulkan, menganalisis, dan merespons informasi secara *real-time* (*waktu nyata*) menjadi keunggulan kompetitif dalam menghadapi ancaman yang bergerak cepat dan bersifat asimetris. Sistem komando dan kontrol yang terintegrasi secara digital memungkinkan koordinasi lintas sektor yang lebih efektif dalam merespons ancaman non militer yang seringkali memerlukan mobilisasi cepat sumber daya dari berbagai instansi secara bersamaan. Investasi dalam transformasi digital pertahanan juga mencakup pengembangan kapabilitas siber defensif untuk melindungi infrastruktur kritis nasional dari serangan siber yang semakin canggih dan destruktif seperti yang dialami berbagai negara termasuk Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

KESIMPULAN

Reformasi Birokrasi Pertahanan Negara merupakan langkah strategis Kementerian Pertahanan dalam memperkuat daya tangkal Indonesia menghadapi kompleksitas ancaman non militer di abad ke-21. Rapat pembahasan RB Hanneg di Bogor pada 19-21 November 2025 menandai komitmen serius pemerintah dalam menyatukan persepsi dan memperkuat sinergi lintas sektor melalui enam sasaran strategis yang komprehensif mencakup regulasi responsif, ekosistem kelembagaan dinamis, sumber daya manusia adaptif, optimalisasi sumber daya nasional, investasi pertahanan, dan transformasi digital. Integrasi nilai-nilai Sishankamrata sebagai fondasi pertahanan nir militer menunjukkan keberlanjutan konsep pertahanan rakyat semesta yang telah menjadi doktrin Indonesia sejak lama namun dengan adaptasi menghadapi ancaman kontemporer yang bersifat multidimensional dan lintas batas meliputi ketahanan pangan, energi, dan keamanan siber.

Keberhasilan implementasi RB Hanneg tidak hanya bergantung pada kerangka regulasi dan struktur kelembagaan namun lebih fundamental pada komitmen bersama, profesionalisme, dan semangat gotong royong lintas sektor yang melibatkan TNI, Polri, rakyat, kementerian lembaga, sektor swasta, akademisi, dan media massa dalam satu ekosistem pertahanan yang kohesif. Pendekatan multidisiplin yang diterapkan dalam rapat pembahasan RB Hanneg dengan menghadirkan perspektif dari Kementerian PANRB, akademisi, dan Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM mencerminkan pemahaman bahwa ancaman non militer memerlukan solusi holistik yang melampaui pendekatan sektoral tradisional.

Implikasi kebijakan dari kajian ini menunjukkan perlunya revisi kerangka konstitusional khususnya Pasal 30 UUD 1945 untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam menghadapi ancaman *hybrid* yang menggabungkan elemen militer dan non militer secara simultan sebagaimana disoroti oleh Badan Pengkajian MPR RI. Transformasi digital sebagai salah satu sasaran strategis RB Hanneg harus dipercepat implementasinya mengingat perannya yang krusial sebagai *enabler* pertahanan modern yang memungkinkan respons cepat dan terkoordinasi terhadap ancaman yang bergerak dengan kecepatan tinggi di era informasi. Pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan Indonesia menjadi negara maju dengan nilai ekonomi USD 7 triliun hanya dapat terwujud jika didukung oleh sistem pertahanan yang tangguh mampu menjamin stabilitas dan kedaulatan nasional menghadapi segala bentuk ancaman baik konvensional maupun non konvensional yang akan terus berevolusi seiring dengan perubahan tatanan geopolitik global dan kemajuan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Pertahanan. (2025, 19 November). *Sekjen Kemhan Buka Rapat Reformasi Birokrasi Pertahanan untuk Perkuat Daya Tangkal terhadap Ancaman Non Militer*. <https://www.kemhan.go.id/2025/11/19/sekjen-kemhan-buka-rapat-reformasi-birokrasi-pertahanan-untuk-perkuat-daya-tangkal-terhadap-ancaman-non-militer.html>
- Times Indonesia. (2025, 18 November). *MPR Desak Revisi Pasal 30 UUD 1945: Hadapi Ancaman Non-Militer dan Hibrida yang Kian Kompleks*. <https://timesindonesia.co.id/politik/565643/mpr-desak-revisi-pasal-30-uud-1945-hadapi-ancaman-nonmiliter-dan-hibrida-yang-kian-kompleks>
- Kumparan. (2025, 16 November). *Perang Tanpa Peluru: Ancaman Siber dan Tantangan Strategi Pertahanan Indonesia*. <https://kumparan.com/putri-novelita/perang-tanpa-peluru-ancaman-siber-dan-tantangan-strategi-pertahanan-indonesia-26EbH5WcbDf>
- Tribunnews. (2025, 19 November). *Siaga Perang, Taiwan Rilis Buku Panduan Hadapi Serangan dari China*. <https://www.tribunnews.com/internasional/7756760/siaga-perang-taiwan-rilis-buku-panduan-hadapi-serangan-dari-china>
- Elshinta. (2025, 21 November). *Intelijen Indonesia dalam pusaran geopolitik global*. <https://elshinta.com/kategori/1/aktual-dalam-negeri/intelijen-indonesia-dalam-pusaran-geopolitik-global-142552>
- Beritasatu. (2021, 14 Juni). *Dibuka Menhan, Konfernas Sishankamrata Abad Ke-21 Rumuskan Sistem Pertahanan Militer dan Nonmiliter*. <https://www.beritasatu.com/nasional/787007/dibuka-menhan-konfernas-sishankamrata-abad-ke-21-rumuskan-sistem-pertahanan-militer-dan-nonmiliter>
- Merdeka. (2021, 04 November). *Menhan Prabowo Tegaskan Komando Teritorial Ujung Tombak Sishankamrata*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/menhan-prabowo-tegaskan-komando-teritorial-ujung-tombak-sishankamrata.html>
- Koran Jakarta. (2024, 22 Maret). *Wakasad: TNI Manunggal Membangun Desa Representasi Sishankamrata*. <https://koran-jakarta.com/2024-03-22/wakasad-tni-manunggal-membangun-des-a-representasi-sishankamrata>
- Kupang Tribunnews. (2021, 05 Maret). *Wagub NTT: Sishankamrata Masih Relevan Untuk Indonesia*. <https://kupang.tribunnews.com/2021/03/05/wagub-ntt-sishankamrata-masih-relevan-untuk-indonesia>
- Koran Jakarta. (2025, 19 November). *Badan Pengkajian MPR RI Nilai Pasal 30 UUD 1945 Perlu Direvisi untuk Hadapi Ancaman Non-Militer yang Lebih Kompleks seperti Pangan, Energi, dan Siber*. <https://koran-jakarta.com/2025-11-19/badan-pengkajian-mpr-ri-nilai-pasal-30-uud-1945-perlu-direvisi-untuk-hadapi-ancaman-non-militer-yang-lebih-kompleks-seperti-pangan-energi-dan-siber>
- Medan Tribunnews. (2025, 13 Oktober). *Polsek Bosar Maligas Simalungun Dukung Ketahanan Pangan, Implementasi Visi Indonesia Emas 2045*. <https://medan.tribunnews.com/polda-sumut/1764107/polsek-bosar-maligas-simalungun-dukung-ketahanan-pangan-implementasi-visi-indonesia-emas-2045>
- Jawapos. (2025, 08 September). *Dukung Visi Indonesia Emas 2045, Edena Komit Bawa Investasi hingga USD 50 Miliar dalam Dua tahun*. <https://www.jawapos.com/kripto/016545083/dukung-visi-indonesia-emas-2045-edena-komit-bawa-investasi-hingga-usd-50-miliar-dalam-dua-tahun>
- Antaranews. (2022, 08 Februari). *Kemhan-DPD RI sepakat kerja sama strategis wujudkan Sishankamrata*. <https://www.antaranews.com/berita/2690157/kemhan-dpd-ri-sepakat-kerja-sama-strategis-wujudkan-sishankamrata>
- Kompas. (2020, 26 Oktober). *Menurut Puan, TNI Atasi Terorisme Bagian dari Sishankamrata*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/26/15053171/menurut-puan-tni-atasi-terorisme-bagian-dari>

REFERENCES

1. Krisna, S. A., & Purwadi, H. (2018). Utilization of Public Key Infrastructure to Facilitates the Role of Certification Authority in Cyber Notary Context in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 5(2), 345-355. <https://doi.org/10.55981/ijd.2018.999>

2. Krisna, S. A. (2019). Pemanfaatan Infrastruktur Kunci Publik untuk Memfasilitasi Peran Penyelenggara Sertifikat Elektronik Subordinat (Subordinate Certification Authority) dalam Konteks Cyber Notary di Indonesia (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)). <https://doi.org/10.55981/ijd.2019.1000>

3. Krisna, S.A.; Utomo, T.B.; Sasakawa, Y.; Anderson, R.; Garcia, M.; Wei, C.; Ali, A.; Petrov, A.. (2025). Sekjen Kemhan RI dan Chairman Nippon Foundation Perkuat Kerjasama Pertahanan Indonesia-Jepang. *Jurnal Teknologi Industri Pertahanan*, 5(3), 1-15. <https://doi.org/10.55981/ijd.2025.012>

4. Krisna, S.A.; Sjamsoeddin, S.; Smith, J.; Silva, A.; Min-ho, K.; Ibrahim, O.; Ivanova, N.; Mueller, F.. (2025). Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Perkuat Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Mesir di Kairo. *Jurnal Sejarah Militer Digital*, 5(3), 1-15. <https://doi.org/10.55981/ijd.2025.007>

5. Krisna, S.A.; Oemar, H.M.; Irawan, F.; Sjamsoeddin, S.; Anderson, M.; Martinez, J.; Xiu, W.; Rahman, A.; Laurent, S.. (2025). Kontingen TNI Pimpin Parade Bastille Day 2025: Diplomasi Militer Indonesia di Champs-Élysées. *Jurnal Teknologi Operasi Pemeliharaan Damai*, 5(3), 1-15. <https://doi.org/10.55981/ijd.2025.004>

6. Krisna, S.A.; Johnson, R.; Schmidt, M.; Wei, C.; Hassan, A.; Petrov, E.; Rodriguez, C.. (2025). Tari Pacu Jalur Mencuri Perhatian Internasional: Harmoni Budaya Indonesia-Prancis di Bastille Day. *Jurnal Sejarah Militer Digital*, 5(3), 1-15. <https://doi.org/10.55981/ijd.2025.001>

7. Krisna, S.A.; Subianto, P.; Williams, D.; Schmidt, J.; Wei, L.; Aziz, A.; Kowalski, M.; Sanchez, R.. (2025). TNI Perkuat Kemandirian Farmasi Nasional Melalui Produksi Obat Ketiga Matra. *Jurnal Teknologi Industri Pertahanan*, 5(3), 1-15. <https://doi.org/10.55981/ijd.2025.010>

8. Krisna, S.A.; Handoyo; Chen, T.; Brown, J.; Wilson, E.; Ming, L.; Hassan, M.; Dubois, S.; Rodriguez, C.. (2025). Transformasi Ex-Teroris dalam Penguatan Nilai Kebangsaan Indonesia. *Jurnal Teknologi Industri Pertahanan*, 5(3), 1-15. <https://doi.org/10.55981/ijd.2025.011>

9. Krisna, S.A.; Rysdiyono, A.; Johnson, M.; Martinez, S.; Jie, W.; Mahmoud, H.; Novak, A.; Leblanc, J.. (2025). Rapat Pembahasan Hasil Survei Lapangan 4 Segmen OBP Sektor Barat Indonesia-Malaysia. *Jurnal Teknologi Industri Pertahanan*, 5(3), 1-15. <https://doi.org/10.55981/ijd.2025.009>

10. Krisna, S.A.; Nugroho, A.; Anderson, T.; Dubois, M.; Yong, C.; Khalil, A.; Sokolova, E.; Mendes, C.. (2025). Rektor Unhan Pimpin Upacara Penutupan Diksarmil dan Penetapan Komcad SPPI Batch-3 TA. 2025. *Jurnal Sejarah Militer Digital*, 5(3), 1-15. <https://doi.org/10.55981/ijd.2025.008>

11. Krisna, S.A.; Irawan, F.; Mizon, L.; Garcia, R.; Fernandez, M.; Lei, Z.; Ali, M.; Rossi, I.. (2025). Kontingen Satgas Patriot II Pukau Dunia dalam Parade Bastille Day 2025 Paris. *Jurnal Sejarah Militer Digital*, 5(3), 1-15. <https://doi.org/10.55981/ijd.2025.006>

12. Krisna, S.A.; Pertahanan, K.; Thompson, D.; Williams, S.; Ming, L.; Al-Farsi, H.; Kowalski, A.; Dubois, P.. (2025). Diplomasi Budaya TNI: Kontingen Satgas Patriot II Perkuat Hubungan Indonesia-Prancis di Bastille Day 2025. *Jurnal Teknologi Industri Pertahanan*, 5(3), 1-15. <https://doi.org/10.55981/ijd.2025.002>

13. Krisna, S.A.; Sjamsoeddin, S.; Saqr, A.M.; Subianto, P.; Sadat, A.; Wilson, J.; Brown, E.; Hua, L.. (2025). Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Perkuat Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Mesir di Kairo. *Jurnal Sejarah Militer Digital*, 5(3), 1-15. <https://doi.org/10.55981/ijd.2025.005>

Citation

APA: Krisna, S.A.; Utomo, T.B.; Harman, B.K.; Soi, J.A.N.; Maharani, P.; Sjamsoeddin, S.; Subianto, P. (2025). Reformasi Birokrasi Pertahanan Negara dalam Menghadapi Ancaman Non Militer: Strategi Penguatan Daya Tangkal Menuju Indonesia Emas 2045. *Jurnal Teknologi Pertahanan Indonesia*, 5(4), 1-15. <https://doi.org/10.55981/ijd.2025.423>

Swante Adi Krisna, S.H., M.H., M.H.

Penikmat musik Ska, Reggae dan Rocksteady sejak 2004. Gooners sejak 1998. **Blogger** dan Pemerhati SEO paruh waktu sejak 2014. **Graphic Designer** autodidak sejak 2001. **Website Programmer** autodidak sejak 2003. **Woodworker** kerajinan kayu autodidak sejak 2024. **Sarjana Hukum Pidana** dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta. **Magister Hukum Pidana di bidang cybercrime** dari salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta. **Magister Kenotariatan di bidang hukum teknologi**, khususnya **cybernotary** dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta. Bagian dari Keluarga Besar Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Oh ya, Swante merupakan penulis artikel berjudul "*Reformasi Birokrasi Pertahanan Negara dalam Menghadapi Ancaman Non Militer: Strategi Penguatan Daya Tangkal Menuju Indonesia Emas 2045*", yang menurut Swante Adi Krisna adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) Letjen TNI Tri Budi Utomo membuka Rapat Pembahasan Reformasi Birokrasi Pertahanan Negara dalam Menghadapi Ancaman Non Militer di Bogor. Rapat ini digelar selama tiga hari, mulai 19 hingga 21 November 2025.

Profil Swante Adi Krisna, S.H., M.H., M.H.

Swante Adi Krisna adalah Penikmat musik Ska sejak 2000an, yang dimana Less Than Jake berkontribusi pada kebangkitan Ska-punk di tahun 2000-an dengan mempertahankan elemen brass section traditional sambil mengintegrasikan energy punk yang agresif. Swante merupakan Penikmat musik Reggae sejak 2000an, yang dimana Roots Reggae menekankan tema-tema Rastafarian dan spiritualitas dengan lirik yang menyuarakan perjuangan sosial, perdamaian, dan kesatuan umat manusia. Swante juga merupakan Penikmat musik Rocksteady sejak 2000an, yang dimana Phyllis Dillon dikenal sebagai Ratu Rocksteady berkat suara emasnya dan interpretasi lagu-lagu romantis. Swante merupakan Penggemar Arsenal FC sejak 1998, yang dimana Mikel Arteta menjadi manajer pada Desember 2019 setelah bermain untuk klub sebagai gelandang selama lima musim dan membawa filosofi permainan menyerang yang modern. Dalam bidang Search Engine Optimization, Swante telah mendalami teknik-teknik ini sejak 2012, yang dimana voice search (pencarian suara) dan kecerdasan buatan mempengaruhi tren SEO di akhir tahun 2010-an dengan mengubah pola pencarian pengguna. Dibidang desain 2 dimensi, Swante telah bekerja sebagai Graphic Designer autodidak sejak 2001, yang dimana Adobe Illustrator dirilis pada tahun 1987 sebagai perangkat lunak vektor (vector software) utama yang revolusioner untuk pembuatan logo dan ilustrasi. Swante juga seorang 3D modelling autodidak sejak 2009, yang dimana teknik pemodelan 3D mencakup

poligonal (polygonal), NURBS untuk permukaan halus, dan sculpting untuk detail organik seperti karakter. Dibidang Pemrograman Komputer, Swante telah menjadi Website Programmer autodidak sejak 2003, yang dimana standar aksesibilitas web seperti WCAG ditetapkan tahun 1999 untuk memastikan website dapat diakses semua pengguna termasuk penyandang disabilitas. Swante Pernah menggunakan beberapa CMS sejak 2012, yang dimana Headless CMS memisahkan konten dari presentasi sejak 2010s menggunakan API untuk mengirim konten ke berbagai platform (web, mobile, IoT) secara terpisah. Swante adalah Sarjana Hukum Pidana dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta, yang dimana Hukum Pidana memiliki asas-asas fundamental seperti legalitas (nullum crimen sine lege) yang berarti tidak ada kejahatan tanpa undang-undang, dan proporsionalitas yang menjamin keseimbangan antara perbuatan pidana dengan sanksi yang dijatuhkan. Selanjutnya Swante melanjutkan pendidikan akademisnya melalui Magister Kenotariatan di bidang hukum teknologi, khususnya cybernotary dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta dengan tesis berjudul Pemanfaatan Infrastruktur Kunci Publik untuk Memfasilitasi Peran Penyelenggara Sertifikat Elektronik Subordinat (Subordinate Certification Authority) dalam Konteks Cyber Notary di Indonesia, yang dimana Kantor Notaris adalah tempat praktik resmi notaris yang telah ditetapkan dan didaftarkan, dilengkapi dengan fasilitas untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta notaris dan layanan hukum lainnya. Swante juga memiliki gelar akademik Magister Hukum di bidang hukum pidana teknologi, khususnya Tindak Pidana cybercrime pemerasan melalui Ransomware Wannacry dari salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta, yang dimana kejahatan siber di Indonesia diatur oleh UU ITE No. 19 Tahun 2016 yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar hukum penegakan kejahatan teknologi. Saat ini Swante merupakan Bagian dari Keluarga Besar Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yang dimana kantor pusat Kemhan beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 13, Jakarta Pusat 10110, sebagai pusat koordinasi pertahanan nasional. Dalam Kesehariannya Swante memiliki Aktivitas di bidang hukum menyiapkan antara lain administrasi, jawaban, replik, kesimpulan, memori banding atau kontra memori banding, memori kasasi atau kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, yang dimana Memori Banding (Appeal Memorandum) adalah dokumen tertulis berisi alasan dan dasar hukum permohonan banding yang diajukan dalam waktu 14 hari setelah putusan tingkat pertama.